

BAB III

KONFLIK RUSIA-UKRAINA DAN SANKSI INTERNASIONAL TERHADAP RUSIA

3.1 Latar Belakang Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2014

Konflik antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2014 yang mencapai puncaknya berakar dari persaingan geopolitik, identitas nasional, dan warisan sejarah pasca-Uni Soviet. Krisis yang didorong dari protes besar-besaran di Kyiv untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden yang pro terhadap Rusia, Viktor Yanukovich setelah membatalkan perjanjian asosiasi dan kerja sama dengan Uni Eropa (UE) pada bulan November 2013. Presiden Yanukovich batal untuk mengesahkan kesepakatan kerja sama dengan Uni Eropa karena dia berpendapat bahwa Ukraina tidak mampu mengorbankan perdagangan dengan Rusia, yang mana hal ini berlawanan dengan kesepakatan tersebut (BBC 2013).

Serangkaian demonstrasi besar itu disebut sebagai Euromaidan. Aksi unjuk rasa ini berkembang menjadi Revolusi Martir setelah tindakan keras berdarah yang dilakukan oleh pemerintah. (Traynor dan Walker 2014). Undang-Undang Anti-Protes disahkan pada bulan Januari 2014 yang bertujuan untuk membatasi kebebasan berkumpul. Puncaknya, pada tanggal 18-20 Februari 2014, terdapat lebih dari 100 orang tewas akibat tembakan oleh *sniper* (penembak jitu). Hari tersebut dikenang sebagai “*Maidan Massacre*” yang berarti “Hari Berkabung” (Guterman dan Polityuk 2014).

Negosiasi yang gagal dan besarnya kemarahan publik, pada akhirnya menyebabkan kejatuhan Yanukovich pada bulan Februari 2014. Presiden Vladimir

Putin melihat revolusi tersebut sebagai ancaman terhadap pengaruh Moskow, sekaligus potensi *domino effect* terhadap stabilitas rezimnya. Rusia memberikan respon yang bersifat konfrontatif atas perubahan kekuasaan di Ukraina.

3.1.1 Aneksasi Krimea Tahun 2014

Rusia dengan sigap mengambil langkah untuk menduduki Semenanjung Krimea setelah kejatuhan Presiden Yanukovych akibat Revolusi Euromaidan. Semenanjung Krimea merupakan wilayah Ukraina yang didominasi oleh penduduk yang berbahasa Rusia dan area markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol. Pada penghujung bulan Februari 2014, terdapat pasukan tidak berseragam (dikenal sebagai “*little green men*”) mulai menduduki pos-pos strategis di Semenanjung Krimea, termasuk gedung parlemen lokal dan bandara Internasional Simferopol.

Pada awalnya, Rusia membantah adanya keterlibatan. Badan intelijen NATO memberikan bukti dan laporan laporan yang mengonfirmasi bahwa pasukan tersebut adalah anggota dari unit Spetsnaz Rusia dan pasukan udara yang bergerak dibawah perintah yang langsung dari Moskow (Simpson 2014). Krimea sudah terkendali secara *de facto* secara cepat. Rusia mendukung otoritas separatis lokal dengan segera melaksanakan referendum pada tanggal 16 Maret 2014, yang memberikan pilihan antara bergabung dengan Rusia atau kembali ke status otonomi tahun 1992.

Berdasarkan hasil resminya, 96% pemilih mendukung aneksasi, dengan tingkat partisipasi mencapai 82% (Kremlin 2014). Referendum ini selanjutnya ditolak oleh Ukraina dan PBB karena diberlangsungkan dibawah pendudukan

militer, tidak memberikan pilihan untuk mempertahankan status quo, serta melanggar hukum internasional tentang integritas teritorial (CBS News 2014).

Presiden Rusia, Vladimir Putin, secara resmi mengesahkan kesepakatan untuk mengintegrasikan Krimea ke dalam Federasi Rusia pada tanggal 18 Maret 2014. Presiden Putin menyatakan bahwa tindakan ini melindungi hak-hak etnis Rusia di Krimea (Kremlin 2014) meskipun referendum ini dianggap tidak sah oleh Ukraina dan komunitas internasional.

3.1.2 Respon Internasional terhadap Aneksasi Krimea Tahun 2014

Komunitas global secara umum menolak penggabungan Krimea dan memberlakukan tindakan sanksi terhadap Rusia. Pada tanggal 27 Maret 2014, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 68/262 yang menegaskan kedaulatan wilayah Ukraina dan menyatakan ketidaksahan referendum Krimea, serta mendorong negara-negara agar tidak mengakui pergeseran status Krimea. Resolusi 68/262 diadopsi dengan hasil suara 100 negara anggota yang mendukung, 11 negara menentang, dan 58 abstain (Zeldin 2014). Rusia menggunakan haknya untuk memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Ukraina mengajukan gugatan terhadap Rusia di Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) atas pelanggaran Konvensi Genosida dan hukum internasional. Klaim Rusia yang menyatakan bahwa referendum Krimea valid berdasarkan “hak menentukan nasib sendiri” ditolak oleh ICJ. Akibat aneksasi yang dilakukan, Rusia dikenakan sanksi ekonomi oleh Sekutu Barat. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara lainnya. Dalam *Executive Order* 13660 tanggal 6 Maret 2014, Amerika Serikat (AS) menerapkan pembekuan aset serta larangan visa bagi

pejabat Rusia dan Krimea yang terlibat. Pembatasan terhadap keuangan pada Bank Rossiya, Gazprombank. AS juga menerapkan pembatasan dalam sektor energi, yaitu pada perusahaan Minyak Rosneft.

Uni Eropa memberlakukan pembekuan aset serta pelarangan perjalanan kepada individu dan kelompok Rusia dan Krimea yang terlibat sebagai sanksi atas aneksasi Krimea. Terdapat pembatasan investasi dan produk impor dari Krimea yang diberlakukan oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Pemerintah Kanada, Bersama dengan mitra dan sekutu, memberlakukan sanksi melalui Peraturan Tindakan Ekonomi Khusus (Peraturan Ukraina) di bawah Undang-Undang Tindakan Ekonomi Khusus (SEMA). Sanksi ini memberlakukan larangan transaksi, yaitu pembekuan aset yang efektif pada individu dan entitas yang mendukung pelanggaran Rusia terhadap kedaulatan Ukraina. Kanada menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 3000 individu dan entitas di Rusia, Belarus, Ukraina, dan Moldova yang terlibat.

Pemerintah Kanada juga menetapkan bahwa setiap orang di Kanada maupun warga negara Kanada di luar Kanada dilarang bertransaksi dengan properti, melakukan transaksi dengan, menyediakan layanan kepada, atau menyediakan barang kepada orang-orang terdaftar (Gazette 2024). Aneksasi Krimea oleh Rusia mengundang respon militer dan keamanan dari Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). NATO menempatkan pasukannya di Bulgaria, Hungaria, Polandia, Estonia, Latvia, Slovakia dan Lituania. *Operation Atlantic Resolve* diluncurkan oleh NATO sebagai penangkal agresi Rusia (NATO, 2025).

Secara hukum internasional, integrasi Krimea ke dalam Rusia tidak diakui oleh PBB dan Ukraina, seperti yang tercantum dalam Resolusi 68/262. Sebaliknya, Rusia membangun citra bahwa tindakan Rusia merupakan “aksi penyelamatan warga Rusia dari pemerintahan fasis Kyiv”. Hal ini menjadi pendorong bagi kebijakan ekspansi berikutnya di Donbas. Peningkatan konflik antara Rusia dan Ukraina pada awal Februari tahun 2022 disebabkan oleh aneksasi Krimea yang terjadi pada tahun 2014.

3.2 Invasi Rusia ke Ukraina (2022)

Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 adalah peningkatan signifikan dari konflik yang sudah ada sejak tahun 2014, saat Semenanjung Krimea dikuasai oleh Rusia serta memberi dukungan kepada kelompok separatis di Donbas, Ukraina timur yang pro-Rusia. Berita mengenai rencana masuknya Ukraina ke dalam keanggotaan NATO kembali terdengar. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mendorong NATO untuk segera memasukkan Ukraina sebagai anggota. Permintaan tersebut ditolak karena Amerika Serikat berpendapat bahwa persyaratan untuk bergabung menjadi anggota belum dapat dipenuhi oleh Ukraina (Najmi dan Lestyaningsih 2022).

Pada akhir tahun 2021, ketegangan semakin tinggi ketika sekitar 100.000 pasukan dikirim oleh pemerintah Rusia ke perbatasan negara Ukraina. Aksi ini memunculkan rasa khawatir akan adanya serangan besar-besaran. Invasi pada tahun 2022 ini dipahami sebagai kelanjutan dari konflik yang dimulai pada tahun 2014 (Saeri, et al. 2023). Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan peluncuran

“operasi militer khusus” pada tanggal 24 Februari 2022 dengan alasan untuk “demiliterisasi dan denazifikasi” Ukraina. Perluasan demiliterisasi dimaksudkan untuk menjamin bahwa tidak ada senjata jarak jauh yang menargetkan kota-kota Rusia (Gunawan 2024).

Lyudmila Vorobyova, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, menyatakan bahwa istilah “Nazi” dalam konteks ini adalah ideologi rezim Ukraina pro-Barat yang mulai berkuasa sejak revolusi Ukraina pada tahun 2014 (Tempo 2022). “Denazifikasi” mempunyai arti yakni Rusia berencana untuk memerdekakan Ukraina dari neo-Nazi (Aida dan Hardiyanto 2022). Upaya “demiliterisasi dan denazifikasi” merupakan istilah yang digunakan oleh pemerintah Rusia untuk menghilangkan pengaruh pro-Barat karena menurutnya, kebijakan pemerintah Ukraina banyak mengandung ideologi anti-Rusia. Presiden Putin pernah mengungkapkan bahwa Rusia dan Ukraina adalah “satu kesatuan” dan bahwa sekutu Barat telah merusak Ukraina dan menariknya keluar melalui identitas yang dipaksakan (CNBC Indonesia 2022).

Serangan militer dilancarkan secara besar-besaran merupakan upaya Rusia dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Kyiv yang pro-Barat. Ada pula, narasi persatuan Slavik, yang dilihat dari historisnya, Ukraina dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari orbit Rusia (Aida dan Hardiyanto 2022). Invasi oleh Rusia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sudah dapat diprediksi. Persiapan invasi ini dimulai sejak bulan Maret hingga April 2021 dan semakin terkonsentrasi pada bulan Oktober 2021 hingga Februari 2022 dengan adanya penumpukan pasukan militer Rusia secara besar-besaran di sekitaran perbatasan

Ukraina (Q, n.d.). Peringatan akan adanya kumpulan pasukan militer Rusia di perbatasan Ukraina disampaikan oleh NATO, namun tidak diperhatikan sepenuhnya oleh pemerintah Ukraina.

Tepat setelah deklarasi Presiden Putin pada tanggal 24 Februari 2022, serangan melalui udara dan rudal ke berbagai kota di Ukraina dilaksanakan. Kota yang diserang merupakan kota-kota penting seperti Kyiv yang merupakan ibukota Ukraina, Kharkiv, Odessa, dan Mariupol. Serangan susulan dengan invasi darat dari utara melalui Belarus, melalui Donbas dari timur, serta melewati Krimea dari arah selatan. Rusia beragumen bahwa faktor utama di balik invasi ini adalah untuk melindungi warga di Donbas yang berbahasa Rusia dan mencegah ekspansi NATO ke Timur, yang dianggap Rusia sebagai ancaman eksistensial, khususnya prospek keanggotaan Ukraina. Bergabungnya Ukraina dengan NATO dapat mengancam keamanan nasional Rusia. Banyak pengamat internasional beragumen bahwa invasi ini merupakan usaha Rusia untuk menentang rezim pro-Barat di Ukraina dan menjaga pengaruhnya di Kawasan bekas Soviet (CNBC Indonesia 2022).

Motivasi lain dari invasi ini adalah keinginan Rusia untuk memperkuat posisinya di Laut Hitam. Ini dinilai sebagai langkah strategis karena wilayah Laut Hitam dinilai sebagai area yang memegang posisi geopolitik, ekonomi, dan militer yang signifikan bagi Rusia, Amerika Serikat, dan NATO. Taktik ini dijalankan untuk memperkuat pengaruh Rusia dan memblokir hegemoni Barat di Timur (Subrata dan Tobing 2023). NATO dinilai sebagai ancaman bagi kedaulatan negara Rusia. Hal ini melebihi sekadar melindungi dan mempertahankan perbatasan.

langkah-langkah yang diambil berlandaskan prinsip-prinsip kemanan yang berkembang setelah Perang Dingin (Hidayat dan Bustomi 2024).

Gerakan awal yang diambil Rusia berjalan dengan cepat dan masif. Dengan sengaja memfokuskan serangan ke ibu kota dan wilayah vital. Rusia mengaplikasikan taktik perang hibrida dalam invasinya yang menyatukan serangan siber, propaganda melalui media, dan pemanfaatan kelompok proxy. Namun, diluar dari prediksi, Ukraina mampu mengeluarkan perlawanan yang intens, yang didukung oleh pelatihan dan persenjataan Barat sejak 2014, menggagalkan rencana Rusia untuk menduduki Kyiv dalam kurun waktu 72 jam. Kegagalan logistik, semangat pasukan yang rendah, dan kesalahan dalam intelijen dalam pengumpulan informasi mengenai dukungan lokal terhadap Rusia memperparah stagnasi dalam serangan (Bailey, et al. 2022).

3.3 Sanksi Internasional terhadap Rusia

Krisis kemanusiaan serius disebabkan oleh invasi Rusia. Senjata berat dan canggih seperti *tank*, helikopter dan pesawat tempur menyebabkan kehancuran parah pada fasilitas umum. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mencatat bahwa dari tanggal 24 Februari hingga 25 September 2022, terdapat 14.844 korban sipil Ukraina; 5.996 orang kehilangan nyawanya dan 8.848 orang yang terluka (United Nations 2022). Secara konsisten Rusia melancarkan serangan udara ke Ukraina. Penggunaan senjata artileri dan peluru kendali memakan korban yang banyak. Serangan sengaja ditujukan kepada

infrastruktur serta jalur distribusi yang mengakibatkan penduduk kehilangan akses kepada listrik dan air.

Invasi skala penuh di Ukraina telah menimbulkan krisis pengungsian yang paling cepat berkembang duni dunia sejak Perang Dunia II. Hampir sepertiga penduduk Ukraina harus meninggalkan rumah dan mengungsi pada tahun 2022 (UNHCR 2022). Penargetan yang disengaja kepada kota dan infrastruktur vital menjadikan tantangan sosial dan demografi untuk jangka yang panjang bagi Ukraina. Krisis akibat serangan yang tidak pandang bulu ini menarik perhatian internasional, khususnya negara-negara anggota PBB yang dengan keras mengecam tindakan invasi oleh pemerintah Rusia.

Berbagai respon dikeluarkan oleh negara-negara dan komunitas internasional mengenai invasi ini. Berbagai upaya turut dikerjakan sebagai respons langsung untuk menghentikan penyerangan Rusia ke Ukraina. Negara-negara Barat menetapkan sanksi secara luas dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia. Sanksi-sanksi diberikan dengan tujuan melemahkan perekonomian Rusia dan kemampuan militernya.

3.3.1 Sanksi Ekonomi

Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Amerika Serikat menjadi aktor yang berperan penting dalam menjatuhkan sanksi ekonomi yang signifikan terhadap Rusia. Serangkaian sanksi ekonomi yang luas dan terkoordinasi ini bertujuan untuk melumpuhkan ekonomi Rusia dan mengurangi kemampuan negara untuk mendanai perang. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang secara agresif menyerang sektor keuangan Rusia. Langkah awal yang signifikan

adalah pembekuan aset Bank Sentral Federasi Rusia yang disimpan di Amerika Serikat.

Dalam kegiatan diplomasi ekonomi berdasarkan tabel Okano-Heijmans (2011), pembekuan aset adalah tindakan di mana aset-aset keuangan dan properti milik individu, entitas, atau lembaga diblokir dan tidak dapat diakses atau dipindahkan (Okano-Heijmans 2011). Aset ini bisa berupa rekening bank, real estat, kapal pesiar, atau aset lain yang dimiliki oleh oligarki Rusia, pejabat pemerintah, dan/atau bank sentral Rusia. Tindakan ini secara efektif menghentikan Rusia dari mendapatkan akses ke cadangan devisa senilai miliaran dolar yang disimpan di bank AS, yang secara signifikan membatasi kemampuan Moskow untuk menstabilkan rubel dan mendanai operasi perang. Presiden Joe Biden yang menjabat saat itu mengumumkan sanksi tahap pertama terhadap Rusia pada masa penandatanganan perintah eksekutif yang mewajibkan sanksi terhadap semua lembaga di industri jasa keuangan Rusia (Sabiila 2022).

Diketahui bahwa lebih dari 80% transaksi harian Rusia dilakukan dalam valuta asing dan setengahnya dilakukan dalam nominal dolar AS (USD). Selain itu, bank-bank besar Rusia, seperti Sberbank, VTB, Gazprombank, dan Alfa-Bank, termasuk lebih dari 50 anak perusahaan mereka, diberlakukan sanksi penuh oleh Amerika Serikat. Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset dan pemutusan hubungan dengan sistem keuangan AS, sehingga sangat sulit bagi bank-bank tersebut untuk melakukan transaksi Internasional. Warga Amerika Serikat juga dilarang untuk melakukan transaksi dengan bank-bank Rusia (Dentons 2022).

Selain daripada itu, sejumlah bank Rusia telah dikeluarkan dari organisasi pembayaran internasional SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*), yang membuatnya jauh lebih sulit untuk mengirim maupun menerima uang antar negara. Dikeluarkannya bank-bank Rusia dari SWIFT dan pembekuan aset Rusia dikategorikan sebagai bagian dari *blacklist* dan mekanisme kontrol modal. Amerika Serikat turut menargetkan oligarki dan individu yang dengan Kremlin di Rusia. Semua aset mereka di Amerika Serikat, termasuk properti mewah, kapal pesiar, dan rekening bank, telah dibekukan. Selain pembekuan aset di yuridiksi AS, oligarki dan pejabat Rusia dilarang untuk melakukan perjalanan. Hal tersebut dilakukan untuk menekan orang-orang di sekitar Presiden Vladimir Putin untuk mempertimbangkan ulang dukungan mereka terhadap invasi (B. N. Indonesia 2024). Dalam kegiatan diplomasi ekonomi, boikot turut diterapkan dalam bentuk pelarangan investasi dan penyediaan barang, jasa, atau teknologi kepada proyek energi Rusia.

AS menerapkan sanksi dalam bentuk embargo terhadap sektor energi karena Rusia adalah eksportir energi terbesar di dunia. Presiden Biden mengumumkan larangan impor batu bara, minyak, dan gas alam dari Rusia ke Amerika Serikat pada bulan Maret 2022 (CNN Indonesia 2022). Langkah ini mengirimkan tanda kuat yang bertujuan untuk menekan pendapatan ekspor energi Rusia, meskipun Amerika Serikat tidak terlalu bergantung pada energi Rusia dibandingkan negara-negara Eropa. Amerika Serikat juga berpartisipasi dalam kelompok G7 dalam usaha menetapkan batas harga minyak mentah Rusia \$60 per barel yang diangkut melalui laut dengan tujuan mengurangi keuntungan dari penjualan minyak Rusia sembari

menjaga agar pasokan minyak global tidak terganggu secara signifikan (White House 2022).

Sebagai salah satu blok ekonomi terbesar di dunia, Uni Eropa (UE) memberlakukan sanksi ekonomi yang luas dan menyeluruh sebagai tanggapan terhadap invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022. Sanksi ini sebagian besar ditujukan untuk melemahkan kemampuan ekonomi Rusia untuk mendanai militer dan kebutuhan perang, membatasi kemampuan negara untuk mendapatkan teknologi penting, dan mengisolasi Rusia dari sistem keuangan global. Sanksi dari Uni Eropa berfokus pada sektor keuangan. Sekitar 70% bank Rusia dibekukan asetnya di yuridiksi Uni Eropa. Sejumlah bank besar seperti Sberbank, VTB, Rossiya, dan Promsvyazbank dibekukan. Aksi ini sangat membatasi kemampuan bank-bank tersebut untuk melakukan transaksi secara global dan mendapatkan modal di pasar Eropa (B. N. Indonesia 2024).

Selanjutnya, Uni Eropa bersama dengan Amerika Serikat mengeluarkan bank-bank Rusia dari sistem SWIFT. Lebih dari dua pertiga aset Bank Sentral Rusia berada di Uni Eropa, dengan sekitar €260 miliar dibekukan di yuridiksi mantra G7, UE, dan Australia (European Union 2025). Bank-bank Rusia tidak dapat berkomunikasi dan bertransaksi dengan lembaga keuangan di seluruh dunia karena dikeluarkan dari sistem SWIFT yang secara efektif mengisolasi Rusia dari sebagian sistem pembayaran global. Untuk menekan sektor keuangan, larangan total transaksi dengan bank-bank Rusia dan pembatasan akses ke pasar modal Uni Eropa diberlakukan (B. N. Indonesia 2024). Larangan total untuk bertransaksi dengan Bank Sentral Rusia secara signifikan mampu membatasi kemampuan Rusia untuk

menggunakan cadangan devisanya untuk mendanai perang ataupun menstabilkan perekonomian negaranya. Pembatasan akses ke pasar modal Uni Eropa membuat Rusia tidak bisa mengumpulkan dana melalui penjualan saham atau obligasi di bursa efek Eropa (Idris dan Mu'tashim 2023).

Sanksi di sektor energi sangat signifikan, mengingat Uni Eropa secara historis telah lama bergantung pada energi Rusia. Pendapatan ekspor energi Rusia sangat terpengaruh oleh larangan impor minyak mentah melalui laut, meskipun, pengiriman melalui pipa ke beberapa negara anggota diizinkan. Hal ini merupakan gangguan yang signifikan bagi salah satu sumber pemasukan dana terbesar Rusia (B. N. Indonesia 2024). Selain itu, agar pendapatan Rusia melemah, Uni Eropa juga memberlakukan larangan ekspor barang mewah ke Rusia dan barang seperti semen, kayu, baja, dan emas dilarang impor dari Rusia.

3.3.2 Sanksi Teknologi dan Informasi

Gelombang sanksi internasional yang dijatuhkan kepada Rusia diberlakukan secara luas, termasuk di sektor teknologi dan informasi. Sanksi ini diberlakukan oleh sejumlah negara dan blok ekonomi, terutama di Barat untuk melemahkan ekonomi Rusia, mengurangi kekuatan militernya, dan menekan Kremlin untuk berhenti melakukan agresi. Sanksi-sanksi dirancang untuk melumpuhkan kemampuan Rusia dalam membiayai perang dan membatasi akses terhadap teknologi canggih yang vital, terutama bagi sektor industri pertahanan.

Sanksi komprehensif diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap Rusia yang bertujuan memberikan dampak jangka panjang. Selain menargetkan aspek ekonomi, Amerika Serikat memusatkan sanksi pada pembatasan ekspor barang-

barang yang dapat dimanfaatkan oleh militer Rusia, seperti teknologi tinggi dan yang memiliki penggunaan ganda (*dual-use goods*). Perusahaan-perusahaan teknologi Rusia dan individu-individu penting terkait dengan sektor teknologi dan pertahanan ditargetkan Amerika Serikat untuk dibatasi kemampuan ekspor dan produksi senjatanya. Langkah yang lebih lanjut diambil oleh Amerika Serikat, yaitu ikut menjatuhkan sanksi pada tahun 2023 ke negara-negara yang terbukti mengekspor teknologi buatan Barat ke Rusia, seperti negara Kyrgyzstan (Timofeev 2023).

Kontrol ekspor yang ketat pada berbagai macam barang dan teknologi penting diberlakukan Uni Eropa, termasuk larangan memberikan bantuan pendanaan, bantuan teknis, layanan perantara, atau layanan lain yang terkait dengan barang penggunaan ganda dan teknologi tinggi (Idris dan Mu'tashim 2023). Di dalamnya, termasuk larangan ekspor laser, sensor, semikonduktor, peralatan telekomunikasi, perangkat lunak enkripsi, dan teknologi yang dapat digunakan untuk keperluan militer dan industri pertahanan. Perusahaan-perusahaan Uni Eropa tidak diizinkan untuk menjalin hubungan atau melakukan transaksi jual-beli dengan perusahaan teknologi dan produsen senjata api yang berasal dari Rusia.

Perusahaan yang dilarang Uni Eropa, antara lain Almaz-Antey (produsen truk), JSC Kalashnikov (perusahaan perancang senjata), dan Rostec (perusahaan pengembangan teknologi pertahanan milik negara), United Shipbuilding Corporation, dan Sevmash (produsen kapal selam nuklir), (Arfiansyah dan Hardiyanto 2022; B. N. Indonesia 2024). Uni Eropa juga menetapkan pelarangan terhadap beberapa media yang menjadi alat kampanye informasi menyimpang

mengenai Ukraina dan media pro-Kremlin, seperti perusahaan Internet Research Agency.

Inggris ikut serta dalam menjatuhkan sanksi dalam aspek teknologi dan informasi. Pemerintah Inggris secara tegas memberlakukan larangan ekspor berbagai jenis teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung pembuatan senjata oleh militer Rusia. Ada pula negara Jepang yang melarang ekspor peralatan keperluan umum yang dapat digunakan oleh militer dan penghentian ekspor peralatan untuk pengolahan minyak ke Rusia. Bersama dengan Amerika Serikat dan sekutu Barat, Jepang memberhentikan ekspor suku cadang penting berupa semikonduktor ke Rusia (VOA Indonesia 2025).

3.3.3 Sanksi Transportasi dan Mobilitas

Berbagai upaya melalui sanksi di berbagai aspek diterapkan guna melemahkan kekuatan Rusia. Banyak negara, terutama Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada menutup rute udara mereka bagi maskapai penerbangan Rusia dan jet pribadi. Hal ini secara dramatis membatasi koneksi internasional maskapai Rusia dan memaksa mereka untuk mencari rute alternatif yang lebih lama dan lebih mahal (Guitarra 2022). Penjualan semua pesawat, suku cadang, dan peralatan kepada maskapai penerbangan Rusia dilarang oleh Uni Eropa. Sanksi ini dimaksudkan untuk melemahkan industri transportasi udara Rusia, yang cukup bergantung pada pesawat dan teknologi Barat, seperti *Boeing* atau *Airspace* (Lecca 2025). Dampaknya adalah perusahaan penyewaan pesawat global terpaksa mengakhiri kontrak dengan maskapai Rusia.

Dewan Uni Eropa mengadopsi paket terbesar yang pernah ada yang menargetkan armada yang berada dibalik bayang-bayang Rusia, dengan menggandakan jumlah kapal yang termasuk dalam daftar yang dikenai larangan akses pelabuhan dan larangan penyediaan berbagai layanan. Terdapat sebanyak 189 kapal yang berasal dari negara ketiga menjadi sasaran, sehingga terdapat total 342 sasaran kapal yang di sanksi oleh Uni Eropa (EU 2025). Kapal-kapal tersebut merupakan bagian dari ‘armada bayangan’ Rusia dan bertanggung jawab untuk membawa minyak Rusia sambil mempraktikkan kegiatan pengiriman yang tidak teratur dan berisiko tinggi untuk mendukung sektor energi Rusia (EU 2025).

Selain mengambil langkah untuk membatasi aktivitas armada Rusia, Uni Eropa juga menargetkan pembatasan kepada perusahaan pelayaran yang bertanggung jawab atas pengangkutan minyak mentah dan produk minyak melalui laut (EU 2025). Beberapa negara, yakni Uni Emirat Arab, Turki, dan Hongkong yang merupakan satu perusahaan asuransi penting bagi industri pelayaran minyak Rusia turut dibatasi (EU 2025). Sejak Uni Eropa memberlakukan pembatasan terhadap harga minyak dan sanksi terhadap armada bayangan, pendapatan Rusia yang relevan telah menurun sebesar 38 miliar Euro atau sekitar 701 triliun Rupiah (menurut kurs per tanggal 2 Juni 2025). Pada Maret 2025 pendapatan Rusia adalah 13,7% yang diyakini lebih rendah daripada pendapatan pada Maret 2023 (EU 2025).

Maersk Line, perusahaan pelayaran terbesar di dunia juga untuk sementara menangguhkan semua pengiriman ke dan dari Rusia dan Ukraina supaya kemampuan Rusia untuk mengirim dan menerima barang terhambat (Aini 2022).

Inggris melarang masuknya semua kapal yang berasal dari Rusia masuk ke pelabuhannya. Dikatakan pula oleh eksekutif pelayaran dan pejabat pelabuhan di Jerman, Belanda, dan Belgia bahwa kapal-kapal yang telah menuju Rusia akan dihentikan dan diperiksa (ABC Express 2022). Keluarnya kapal-kapal tersebut dari pasar dengan pasti akan mengubah arus perdagangan dan hingga mengganggu barang dan kargo yang masuk maupun keluar Eropa (ABC Express 2022).

Untuk memaksimalkan tekanan, Uni Eropa telah melarang operator angkutan jalan raya, trailer, dan semi-trailer Rusia dan Belarusia untuk mengangkut barang ke Uni Eropa, termasuk dalam transit. Guna dari pelarangan ini adalah untuk membatasi kapasitas industri Rusia untuk memperoleh barang-barang utama yang dapat digunakan untuk perang (European Council 2024). Meskipun, ada pengecualian untuk beberapa kategori barang dan jalur kereta api, Uni Eropa menerapkan larangan penuh terhadap transaksi dengan perusahaan milik negara Rusia secara umum.

Keefektifitasan sanksi dalam jangka panjang masih menjadi pro dan kontra. Rusia telah mencari jalur alternatif, seperti membangun hubungan ekonomi yang lebih baik dengan negara-negara non-Barat dan mencari cara lain untuk mengimpor barang. Selain daripada itu, pelaksanaan sanksi yang lebih ketat pada awalnya terhambat karena ketergantungan awal beberapa negara anggota Uni Eropa pada energi Rusia. Uni Eropa dan sekutu Barat terus beradaptasi, mengubah, dan memperkuat sanksinya sebagai tanggapan terhadap apa yang terjadi di Ukraina akibat invasi tersebut.

3.4 Dampak Sanksi Internasional bagi Rusia

Sanksi ekonomi yang dikenakan oleh negara-negara Barat terhadap Rusia, terutama setelah invasi yang dilakukan ke Ukraina pada bulan Februari 2022, memiliki konsekuensi yang kompleks dan multifaset. Rusia telah mendapatkan banyak tekanan untuk melemahkan ekonominya agar Rusia dapat menghentikan penyerangannya ke Ukraina. Sanksi yang diberlakukan telah menciptakan dampak yang signifikan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat Rusia secara keseluruhan. Tekanan tetap dirasakan di berbagai sektor, meskipun ada upaya pemerintah Rusia untuk memitigasi dampak tersebut.

Hampir sekitar 70%, aset bank-bank Rusia dibekukan, pembekuan sekitar 350 miliar dolar AS atau hampir setengah dari total cadangan devisa Rusia, dan dikeluarkannya dari sistem pembayaran global SWIFT (Amaranggana dan Patnistik 2024). Sanksi-sanksi yang dikenakan ini mempersulit pemerintah untuk melakukan transaksi secara internasional, mengelola cadangan devisa, dan mengakses pasar modal global. Kemampuan pemerintah untuk mendanai berbagai program, termasuk belanja negara dan proyek infrastruktur terhambat dan terbatas. Pemblokiran ekspor teknologi, impor emas dan berlian dari Rusia, serta sanksi-sanksi terhadap oligarki yang terlibat dalam invasi yang dilakukan negara-negara Barat cukup memberikan pengaruh terhadap kestabilan ekonomi Rusia.

Akibat ketidakamanan yang terjadi, setelah ratusan perusahaan asing meninggalkan Rusia, yang membalikkan sekitar tiga puluh tahun investasi asing, Rusia mengalami penurunan tajam dalam investasi langsung asing dan kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan internasional. Pembatasan harga minyak oleh G7

dan larangan impor minyak dan gas Rusia oleh Amerika Serikat untuk mengurangi pendapatan ekspor membuat Rusia mengalihkan ekspornya ke negara-negara seperti India dan Tiongkok. Namun, upaya pengalihan ekspor ini mengurangi pendapatan keseluruhan karena seringkali diberikan dengan harga diskon (B. N. Indonesia 2024). Ruang fiskal pemerintah untuk investasi atau program-program sosial menjadi terbatas akibat turunnya pendapatan.

Larangan ekspor teknologi, terutama yang berkaitan dengan industri strategis dan militer, menghambat upaya pemerintah Rusia untuk memodernisasi industri dan sektor pertahanan (B. N. Indonesia 2024). Hal tersebut mempersulit Rusia untuk mengembangkan sektor-sektor non-energi dan diversifikasi ekonomi. Rusia berusaha mengambil jalur alternatif dengan mencari pemasok dari negara-negara non-Barat. Kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diintegrasikan dan kualitas yang tidak sebagus sebelumnya (Astrov, et al. 2024). Sebagai contoh, produksi mobil mengalami penurunan drastis. Pada kuartal pertama tahun 2023, kurang dari 25% dari tingkat sebelum invasi (Korhonen 2023).

Untuk menopang nilai Rubel dan mencegah kekhawatiran ekonomi pada awal sanksi, pemerintah dan Bank Sentral Rusia harus menaikkan suku bunga dan acuan secara drastis (Associated Press 2023). Tekanan untuk mempertahankan stabilitas mata uang dan mengontrol inflasi masih tinggi, meskipun Rubel berhasil pulih. Pengeluaran militer yang meningkat pesat pada tahun 2023 meningkatkan anggaran pemerintah, dan inflasi yang naik membatasi fleksibilitas kebijakan moneter pemerintah Rusia (Amaranggana dan Patnistik 2024). Pengaruh Rusia memudar

seiring pembatasan dari negara-negara Barat yang mengisolasi Rusia secara politik dan ekonomi.

Dampak secara langsung yang paling dirasakan oleh masyarakat yang hidup di Rusia adalah lonjakan inflasi. Harga barang-barang kebutuhan pokok, seperti makanan dan susu meningkat pesat. Ini mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang tersebut dan menurunkan anggaran rumah tangga, terutama di wilayah pedesaan. Standar hidup rata-rata orang Rusia menurun akibat inflasi yang terjadi. Perusahaan multinasional Barat banyak yang pergi meninggalkan pasar Rusia sebagai tanggapan terhadap sanksi, yang sebelumnya produk Barat mudah diakses, kemudian mengalami kelangkaan. Mulai dari suku cadang mobil, teknologi, dan barang mewah.

Pada sub-bab sebelumnya, telah disebutkan bahwa sanksi yang dikenakan termasuk sanksi visa dan pembatasan perjalanan oleh beberapa negara Barat. Sanksi ini sangat membatasi mobilitas warga Rusia, termasuk diplomat dan pebisnis. Hal ini dapat berpengaruh pada mengecilnya peluang pendidikan, pekerjaan, dan pariwisata bagi warga Rusia (Massaguni, Badu, dan Sallatu 2022, 61-62). Lebih dari satu juta orang, khususnya yang berpendidikan tinggi dan orang muda, telah meninggalkan Rusia sebagai akibat dari invasi ke Ukraina dan sanksi yang berlaku (Amaranggana dan Patnistik 2024). Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang, seperti terganggunya pertumbuhan ekonomi, menurunnya inovasi dan sumber daya manusia usia produktif.

Sanksi yang dikenakan dirancang dengan tujuan menghambat sektor ekonomi, pertahanan, dan kemampuan operasional pemerintah. Terbatasnya

kemampuan Rusia dalam mengakses teknologi canggih, perangkat lunak, dan layanan digital dari negara-negara Barat, memberikan dampak yang cukup signifikan. Sebagai sanksi, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Barat lainnya melarang kegiatan ekspor barang dan teknologi ganda beserta teknologi canggih ke Rusia. Layanan IT tertentu seperti perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), manajemen hubungan pelanggan (CRM), dan perangkat lunak desain berbantuan computer (CAD) diberhentikan. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam memperoleh komponen vital untuk produksi senjata dan sistem pertahanan bagi industri teknologi dan militer Rusia (Barker, et al. 2024).

Ketidakdapatannya akses ke teknologi tinggi, mendorong Rusia untuk mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang dapat diandalkan. Kualitas dan kompatibilitas kerap menghalangi pergantian teknologi Barat dengan alternatif domestik atau dari negara ketiga. Proyek-proyek digitalisasi dan pengembangan layanan publik berbasis teknologi melambat. Akses ke platform seperti *Microsoft Teams*, *Zoom*, *Instagram*, dan produk lainnya dibatasi oleh perusahaan Barat. Langkah ini menyebabkan isolasi digital dan membatasi kolaborasi internasional bagi masyarakat Rusia. Selain daripada bentuk sanksi, untuk meningkatkan pengontrolan dan menjaga kerahasiaan informasi, pemerintah Rusia juga melarang platform media sosial asing dan menggantikannya dengan platform domestik buatan Rusia, seperti *VKontake* dan *RuTube* (CNN Indonesia 2022).

Jumlah teknologi konsumen seperti ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik lainnya yang dilarang di ekspor telah menurun di pasar Rusia. Karena keterbatasan pasokan dan kebutuhan akan rute impor yang lebih mahal. Harganya

cenderung meningkat drastis jika tersedia. Warga Rusia mengalami kesulitan transaksi internasional akibat penangguhan dari perusahaan kartu pembayaran internasional seperti VISA dan *MasterCard*. Kartu pembayaran nasional Rusia, Mir, dapat digunakan secara terbatas di luar negeri. Adaptasi dengan sistem baru memerlukan waktu dan upaya bagi masyarakat Rusia.

Ketidakstabilan politik akibat sanksi telah mendorong eksodus besar-besaran tenaga kerja di sektor teknologi. Terdapat kira-kira 250.000 sampai 500.000 profesional IT telah meninggalkan Rusia (Research Service 2023). Penarikan perusahaan teknologi asing dari Rusia pada sektor IT domestik mengakibatkan pekerja profesional IT Rusia kehilangan pekerjaan atau harus mencari peluang di luar negeri. Perusahaan IT domestik Rusia memerlukan pendanaan, infrastruktur, dan akses ke teknologi terbaru untuk mengisi kekosongan tersebut.

Sanksi mendorong Rusia untuk lebih banyak bekerja sama dan bergantung kepada negara “sahabat”, yakni Tiongkok, Belarusia, Iran, Kazakhstan, dan negara lainnya. *Drone* militer yang diproduksi oleh Rusia merupakan desain dari Iran dan kerjasama dengan perusahaan teknologi dengan Tiongkok diperkuat untuk menggantikan produk dan layanan yang sebelumnya disediakan oleh perusahaan dari negara Barat (Ilyushina 2025). Masyarakat Rusia baik warga negara maupun asing dibatasi dalam transaksi keuangan dan komunikasi. Negara Barat menghimbau negara-negara untuk melakukan penghentian dalam memberi bantuan khususnya bagi militer Rusia, dan mensanksi negara yang terbukti memberikan bantuan kepada Rusia.

Penutupan wilayah udara bagi maskapai penerbangan Rusia oleh banyak negara, terutama oleh Uni Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Hubungan internasional Rusia menurun drastis. Maskapai penerbangan Rusia dilarang untuk terbang langsung ke banyak tujuan wisata populer yang membuat mereka harus mencari rute perjalanan alternatif yang mana membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih mahal, dan atau penerbangan dihentikan sama sekali. Contohnya, pada awal invasi, jika ingin melakukan perjalanan dari Indonesia ke kota Irkutsk, Rusia, harus mengambil penerbangan ke Bangkok, Thailand, kemudian transit di Kazakhstan. Dari negara Kazakhstan mengambil penerbangan ke Moskow, dan jika beruntung, bisa mendapatkan penerbangan langsung dari Moskow ke Irkutsk. Jika tidak, dari Moskow harus transit ke kota lain di Rusia untuk sampai di Irkutsk.

Terjadinya pembatasan pada pemeliharaan dan perbaikan yang bergantung pada teknologi dari Barat, serta pelarangan penjualan semua pesawat, suku cadang, dan peralatan kepada maskapai penerbangan Rusia (B. N. Indonesia 2024). Maskapai-maspakai Rusia mengalami kesusahan dalam mempertahankan armada mereka karena sebagian besar merupakan pesawat buatan asing. Hal ini mendorong Rusia untuk melakukan praktik “kanibalisasi”, yang berarti menggunakan suku cadang dari pesawat lain yang tidak beroperasi. Rusia juga menggunakan jalur impor tidak resmi, termasuk melalui bagasi penumpang dan perusahaan perantara (Leonelli 2024).

Akibatnya untuk Rusia yang kekurangan suku cadang dan pemeliharaan yang tidak memadai adalah terjadinya kenaikan insiden keselamatan penerbangan. Pada

bulan Desember 2023, delapan insiden serius yang tercatat dalam delapan hari pertama bulan Desember dikarenakan kehilangan tekanan kabin dan kegagalan mesin (Dixon 2024). Kualitas efisiensi infrastruktur transportasi diperkirakan akan terus menurun seiring waktu dan akan memengaruhi aksesibilitas perjalanan ke berbagai wilayah jika tidak ditangani oleh pemerintah Rusia.

Pembatasan Visa dan perjalanan meskipun tidak diterapkan kepada semua masyarakat, tetapi hanya kepada individu dan kelompok tertentu, menciptakan iklim yang sulit bagi mobilitas internasional secara keseluruhan. Individu maupun kelompok yang tidak masuk ke dalam daftar sanksi juga menghadapi kendala untuk mendapatkan Visa dan melakukan perjalanan internasional (Katriana 2024). Bagi masyarakat Rusia, pemeriksaan dan proses visa yang lebih ketat ditingkatkan, berpotensi untuk membatasi kemampuan mereka untuk melakukan perjalanan internasional maupun mengelola aset di luar negara. Warga negara Rusia mengupayakan pemindahan aset ke negara yang tidak memberi sanksi kepada Rusia untuk menghindari pembekuan aset.

Harga bahan bakar dan biaya transportasi yang semakin naik membebani anggaran rumah tangga, khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan dan bagi yang memiliki pendapatan rendah. Mobilitas untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain perlu dipertimbangkan untuk menghemat pengeluaran. Hal ini menjadi beban tambahan bagi pemerintah untuk mengembangkan dan memperbaiki sistem transportasi dan penyediaan layanan publik di teritorial Rusia yang luas. Sanksi-sanksi internasional telah mempengaruhi transportasi dan mobilitas Rusia secara signifikan, menyebabkan

kelangkaan operasi, penurunan keselamatan, dan peningkatan biaya perjalanan. Pemerintah Rusia sudah mencoba untuk menangani masalah ini melalui substitusi di dalam negeri, secara signifikan masih menjadi hambatan jangka panjang.

Meskipun sanksi dimaksudkan untuk melemahkan dan mempengaruhi pemerintahan Rusia agar menarik militernya dari Ukraina, dampaknya juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal maupun asing. Demikian, benarlah pernyataan yang dinyatakan oleh Berridge and James, pemanfaatan sumber daya ekonomi berupa sanksi, dapat digunakan untuk meraih tujuan tertentu dalam kebijakan luar negeri. Sanksi-sanksi dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Barat lainnya menggunakan sumber dayanya untuk melumpuhkan ekonomi Rusia, sehingga memungkinkan Rusia untuk menghentikan serangannya.

